

PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS RUKUN WARGA (PMB-RW) DI KOTA PEKANBARU

Sri Wahyuni, Zaili Rusli SD

Public Administration Study Program, Administration Science Department
Faculty of Social and Political Sciences, University of Riau, Pekanbaru, Indonesia.

Abstract

The implementation of this program began by providing skills through training to citizens who became the target of implementing the PMB-RW program. There are still many activities that have not been implemented in the PMB-RW program. In addition to the activities that have not been carried out, activities that have been running have not been optimal as planned. In addition there are problems related to activities that must be prioritized. Activities that are carried out are still said to be activities that are not priority, due to a minimal budget. It has not improved the welfare of the community from the economic and social sectors which should be the goal of the implementation of the PMB-RW Program in the West Sidomulyo Village. With the knowledge and skills in these various fields, it can be one of the capital for the community to create new jobs. The research was carried out using descriptive qualitative research methods. This study uses the concept of community empowerment by Sumaryadi, namely: Independence, Progress, Welfare, Justice and Sustainability. This research data collection techniques that are carried out are observation, interviews, documentation and literature study using descriptive analysis techniques. The implementation of the Community-Based Community Empowerment Program (PMB-RW) in the West Sidomulyo Village has not been able to improve the economic, social, community, but the knowledge of the community participating in the training has been obtained in the implementation of the PMB-RW Program. Participation of companion agencies has been running and has benefits for the implementation of the PMB-RW Program in planning and supervision. Community participation in the idea of activities has been carried out through deliberation, coordination and communication. However, the participation of funds is still limited by City government so that the planned activities cannot run all. The factors that influence the implementation of Community Based Community Empowerment Program (PMB-RW) in West Sidomulyo Village are the participation in the form of funds and energy/ideas in the form ideas and justice. Funds for the implementation of activities that will affect the implementation so that the participation of counterpart workers and ideas of ideas goes according to the wishes of the community. So that the ongoing justice in the implementation of this program.

Keywords: Community Empowerment, Development

Latar Belakang Masalah

Salah satu persoalan mendasar kehidupan bernegara dalam proses penyelenggaraan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah adalah bagaimana membangun atau menciptakan mekanisme pemerintahan yang dapat mengembang misinya yaitu untuk mensejahterakan masyarakat secara berkeadilan. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat pemerintah harus melaksanakan pembangunan. Salah satu bentuk penyelenggaraan pemerintahan yaitu upaya untuk selalu melakukan pembangunan diberbagai sektor baik itu berupa fisik maupun non fisik.

Pemberdayaan adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan, meningkatkan kekuasaan atas mereka yang kurang beruntung dari segi potensi yang dimiliki masyarakat. Sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik dibidang ekonomi, sosial, agama dan budaya. Maka dari itu dikeluarkanlah keputusan walikota dengan pelaksanaan program PMB-RW.

Pembangunan merupakan suatu rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju moderitas dalam rangka pembinaan bangsa. Perubahan tersebut dilakukan secara kontinuitas menurut keadaan yang lebih baik. Pembangunan yang dilakukan tidak saja dalam arti pembangunan fisik tetapi juga pembangunan non fisik sehingga tujuan rakyat Indonesia yaitu menuju masyarakat yang adil dan makmur dapat dicapai.

Pemerintahan era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, dengan program unggulannya yaitu *nawacita* dimana yang menjadi tiga pokok utamanya yaitu pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia dan pembangunan sektor ekonomi. Sejalan hal tersebut pemerintah menyediakan berbagai kebijakan dengan sasaran yaitu kesejahteraan masyarakat. Termasuk juga

didalamnya kebijakan-kebijakan lokal yang dibuat oleh pemerintah daerah.

Kota Pekanbaru merupakan daerah yang memiliki sumber informasi yang sangat bermanfaat untuk kepentingan pemerintah maupun bagi masyarakat, sehingga sumber informasi yang berkembang adalah bagian dari produk hukum maupun kearifan lokal yang ada di Kota Pekanbaru.

Sumber informasi hasil regulasi maupun kearifan lokal tersebut adalah merupakan Manajemen pengetahuan (*Knowledge Management*), hal ini merupakan proses sistematis untuk menemukan, memilih, mengorganisasikan, menyaring dan menyajikan informasi dengan cara tertentu, sehingga para pemangku kepentingan mampu memanfaatkan dan meningkatkan penguasaan pengetahuan kondisinya eksisting Kota Pekanbaru dari masa kemasa menjadi suatu bidang kajian yang spesifik, untuk kemudian menginstitutionalkannya menjadi pengetahuan lembaga pemberdayaan bagi kepentingan pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk bersama-sama membangun Kota Pekanbaru.

Selama ini banyak produk-produk hukum dan kearifan lokal yang ada masih merupakan *Tacit Knowledge* bagi pimpinan/lembaga tertentu yang ada di Kota Pekanbaru, sehingga gagasan Walikota Pekanbaru yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) jangkauannya cukup jauh kepada masyarakat.

Oleh karena itu pemerintah/lembaga lain di Kota Pekanbaru harus mengambil langkah agar *Tacit Knowledge* tidak hanya difahami oleh pimpinan/lembaga di level-level tertentu, maka Pemerintah memberi peluang dan kesempatan kepada masyarakat untuk mengikut sertakan peran masyarakat di level Rukun Warga dari *Tacit Knowledge* menjadi *Explicit Knowledge* yang berperan sebagai media komunikasi pembangunan, artinya RPJMD perlu diterjemahkan kedalam bentuk program melalui pendekatan Pemberdayaan bersama-sama masyarakat Kota Pekanbaru.

Berbagai kebijakan pemberdayaan masyarakat lokusnya masih di tataran kelurahan, sehingga masyarakat di level RW/RT masih mengalami kendala informasi untuk mengakses beberapa program pemberdayaan yang ada di tingkat kelurahan, solusi yang ditawarkan melalui Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Kota Pekanbaru guna mencapai:

1. Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani, yaitu Masyarakat Yang Mandiri, Tangguh Dan Berdaya Saing Perlu Melakukan Berbagai Inovasi Pemberdayaan Masyarakat.
2. Salah satu strategi pemberdayaan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat adalah pemberdayaan yang berbasis wilayah, dengan ruang lingkup Rukun Warga.
3. Bahwa Pemberdayaan harus dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan melalui partisipasi aktif masyarakat yang diinisiasi oleh pemerintah Kota kemudian dilanjutkan secara mandiri oleh masyarakat.
4. Program pemberdayaan berbasis wilayah Rukun Warga merupakan langkah awal dalam mewujudkan *Smart City*, dengan indikator *Smart Governance*, *Smart People*, *Smart Economy*, *Smart Environment*, *Smart Living* dan *Smart Mobility*.
5. Bahwa untuk mewujudkan program pemberdayaan yang mandiri diperlukan peran dan komitmen pemerintah Kota dan *Stake holder* terkait dalam memberikan dorongan, bantuan dan pembinaan.

Untuk memenuhi kepentingan peningkatan status payung hukum Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) dibutuhkan regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah

yang dapat memberikan pedoman bagi pemerintahan Kota Pekanbaru dan masyarakat untuk melaksanakan PMB-RW Kota Pekanbaru.

Rukun Warga merupakan pembagian wilayah di Indonesia di bawah Dusun atau Lingkungan. Rukun Warga bukanlah termasuk pembagian administrasi pemerintah, dan pembentukannya adalah melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan masyarakat yang ditetapkan oleh Desa atau Kelurahan.

Rukun Warga dipimpin oleh ketua RW yang dipilih oleh warganya. Dalam hal ini banyak pemilihan ketua RW di Indonesia yang di model mirip dengan pemilihan presiden atau Pemilihan Kepala Daerah, dimana terdapat kampanye dan pemungutan suara. Sebuah RW terdiri atas sejumlah Rukun tetangga.

Rukun Warga merupakan sebuah organisasi masyarakat yang diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah.

Kota Pekanbaru pun termasuk salah satu kota yang menciptakan inovasi kebijakan untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat yaitu Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB RW) ini bertujuan menciptakan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, baik secara individu maupun kelompok untuk turut berpartisipasi memecahkan berbagai permasalahan yang terkait pada upaya peningkatan kualitas kehidupan, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat. Mekanisme penyelenggaraan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB RW) menerapkan pendekatan pembangunan berkelanjutan berbasis masyarakat melalui

pelibatan masyarakat secara utuh dalam seluruh tahapan kegiatan, mulai dari pengorganisasian, perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan di lapangan.

Berbasis RW dalam program ini dimaksud dari perencanaan. Perencanaan dilakukan dengan musyawarah yang dilakukan ditingkat RW. Berbasis RW ini untuk mengetahui permintaan di setiap RW. Dari permintaan tersebut nantinya akan diutamakan mana yang lebih harus di prioritaskan untuk dijalankan kegiatannya. Hal tersebut mengingat anggaran yang ada tidak bisa memenuhi semua permintaan kegiatan yang diminta pada setiap RW.

Berbagai macam produk hukum yang dikeluarkan pemerintah pun menjadi rujukan program PMB RW. Di antaranya Instruksi Presiden (Inpres) No.3 tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan, Peraturan Mendagri No.42 tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten Kota, serta Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru No.19 tahun 2012 tentang RPJM Pekanbaru. Setelah merujuk kepada regulasi di atas, maka untuk teknis operasional diatur dengan melalui Peraturan Daerah (Perda) Pekanbaru No. 5 tahun 2016 tentang PMB RW Kota Pekanbaru.

Dasar Hukum Program PMB RW Sementara penggunaan dana program PMB RW sendiri mengacu kepada lima strategi dasar pembangunan Kota Pekanbaru menuju terwujudnya Pekanbaru sebagai Kota Metropolitan yang Madani. Kelima strategi dasar yang dimaksud di antaranya. (1) Untuk penataan ruang kota. (2) Melakukan pembenahan infrastruktur dasar. (3) Penerapan pendekatan kota modern, *smart city*, *lifeindo city*, *green city* dan lainnya. (4) Pengembangan kawasan perkotaan yang berada dalam Pekansikawan. (5) Terakhir untuk pemberdayaan masyarakat.

Tujuan dari program ini untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial kaum miskin dan memperluas kesempatan kerja mereka melalui konsultasi masyarakat, pemberdayaan, dan pembangunan kapasitas pada tingkat lokal. Sedangkan danaProgram

Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) diperuntukkan kepada masyarakat dengan tiga sasaran program, yakni untuk usaha, pendidikan, dan pembenahan lingkungan. Dengan demikian diharapkan mampu mempercepat penataan dan peningkatan ekonomi masyarakat.

Penggunaan bantuan sendiri, ditetapkan melalui rapat musyawarah RW yang nantinya di SK kan dengan surat sebagai lembaga penyelenggara. Dalam rapat musyawarah, RW akan menetapkan kemana dan apa yang harus dibangun sesuai keinginan masyarakat. Tak hanya untuk usaha, pendidikan, dan pembenahan lingkungan saja, danaProgram Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) juga bisa digunakan dalam bentuk simpan pinjam dan pembangunan fisik yang mendadak.

Agar pelaksanaan program berjalan lancar, Pemerintah Kota Pekanbaru telah menyiapkan tenaga pendamping sebanyak 128 orang yang diambil dari kalangan sarjana melalui seleksi ketat. Sarjana pendamping yang terpilih akan bekerja selama satu tahun untuk 12 kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru.

Alasan mempekerjakan tenaga pendamping dalamProgram Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) ini mengingat latar belakang pendidikan ketuaRW di Pekanbaru sangat beragam. Untuk itu perlu pendamping untuk mengarahkan RW penerima bantuan agar dapat memanfaatkan dana tersebut secara tepat sasaran. Pemko Pekanbaru, berharap melalui program pemberdayaan masyarakat berbasis RW ini benar-benar bermanfaat dan tepat sasaran, serta dapat dipertanggungjawabkan baik secara kualitas maupun untuk kepentingan masyarakat Pekanbaru.

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) pada prinsipnya merupakan upaya pemko untuk pengembangan perekonomian di tingkat masyarakat yang berkaitan dengan usaha mikro. Sehingga, nantinya masyarakat akan timbul peran serta dalam membangun Kota Pekanbaru. Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) bukanlah program yang

dibuat serta merta asal jadi. Akan tetapi sudah melalui pemahaman yang komprehensif dan kajian yang mendalam terhadap kondisi riil masyarakat Pekanbaru terutama menghadapi perkembangan tantangan yang semakin besar. Dengan melaksanakan kegiatan pemberdayaan tentunya sangat diharapkan nanti akan mendapatkan manfaat dan tujuan dari pemberdayaan tersebut.

- a. Menumbuhkan semangat berwirausaha bagi masyarakat miskin melalui pembentukan kelompok usaha bersama, kelompok usaha bersama yang sebelumnya kita memberi pengertian akan manfaatnya jika mampu menjadi orang yang mandiri
- b. Memberdayakan potensi masyarakat miskin dalam meningkatkan pendapatan keluarga melalui peningkatan usaha ekonomi produktif. *Home industry* yang menjadi sasaran terdekat, ditambah potensi lokal yang harusnya bisa lebih berdaya guna untuk masyarakat.
- c. Memberi alternatif usaha pada masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga.
- d. Membekali masyarakat dengan informasi-informasi untuk memiliki jiwa kewirausahaan dalam mengembangkan.

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB RW) pada prinsipnya merupakan upaya pemko untuk pengembangan perekonomian di tingkat masyarakat yang berkaitan dengan usaha mikro. Sehingga, nantinya masyarakat akan timbul peran serta dalam membangun Kota Pekanbaru. Dana yang disalurkan tidak dikelola secara sendiri oleh RW penerima bantuan. Selain didampingi tenaga pendamping, RW juga akan diarahkan oleh Organisasi Masyarakat Sekitar (OMS), yang dipercayai mengelola dana Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun

Warga (PMB-RW) bersama RW. Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) bukanlah program yang dibuat serta merta asal jadi. Akan tetapi sudah melalui pemahaman yang komprehensif dan kajian yang mendalam terhadap kondisi riil masyarakat Pekanbaru terutama menghadapi perkembangan tantangan yang semakin besar.

Kemudian dipertegas lagi dengan Instruksi Presiden (Inpres) No.3 tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan, Peraturan Mendagri No.42 tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten Kota, serta Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru No.19 tahun 2012 tentang RPJM Pekanbaru. Setelah merujuk kepada regulasi di atas, maka untuk teknis operasional diatur dengan melalui Peraturan Daerah (Perda) No. 05 tahun 2016 tentang PMB RW Kota Pekanbaru.

Fenomena yang terjadi dalam program PMB-RW di Kota Pekanbaru sebagai percontohan pada Kelurahan Tangkerang Labuai sebagai yang mana wilayah tersebut telah melaksanakan pelaksanaan PMB-RW pada wilayah tersebut, sedangkan wilayah kelurahan yang bisa dibilang belum ada melaksanakan pelaksanaan PMB-RW ini dikelurahan sebagai percontohan yaitu sosialisasi yang dilaksanakan oleh pihak Kelurahan Sidomulyo Barat terhadap masyarakat belum maksimal sehingga pemahaman masyarakat terhadap kegiatan ini hanya sekedar mengikuti program dan memiliki keterampilan sesuai dengan konsep pemberdayaan. Dalam pemahaman masyarakat bukan harapan memiliki keterampilan baru yang pada akhirnya memberikan perubahan dari sisi ekonomi lebih mandiri namun kenyataannya kegiatan ini seperti tidak tepat sasaran baik dari pelatihan bengkel motor, bengkel las, tata boga, membatik dan lain-lain.

Maka dari itu dengan adanya permasalahan ataupun penghambat dalam pelaksanaan PMB-RW di Kecamatan Tampan Kelurahan Sidomulyo Barat di Kota Pekanbaru membuat peneliti tertarik meneliti Pelaksanaan PMB-RW dengan permasalahan mengenai **“Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis**

Rukun Warga (PMB-RW) di Kota Pekanbaru”

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pemberdayaan Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) di Kota Pekanbaru ?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemberdayaan berbasis Rukun warga (PMB-RW) di Kota Pekanbaru ?

Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) di Kota Pekanbaru
- b. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi pada Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) di Kota Pekanbaru

Manfaat Penelitian

Dengan melakukan penelitian tentang Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) di Kota Pekanbaru, dari segi ilmu pengetahuan dan manfaat praktis terdapat manfaat yang diambil, baik dari dimensi teoritis maupun dimensi praktis manfaat penelitian adalah:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan untuk menambah pengetahuan penulis tentang teori pelaksanaan dalam pemberdayaan masyarakat. Hasil penelitian juga dapat

menjadi literatur yang memberikan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat pada umumnya dan instansi pemerintah yaitu kelurahan.

2. Manfaat Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan bisa sangat bermanfaat sebagai bahan masukan dan sumbangan pikiran bagi pihak-pihak terkait terutama bagi Walikota Pekanbaru dan BAPPEDA Kota Pekanbaru sebagai pelaksana dari PMB-RW itu sendiri, serta dinas terkait dalam penataan PMB-RW tersebut.

Konsep Teori

Untuk menghindari terjadinya kesalahan penafsiran dalam penelitian ini, penulis memberikan paparan konsep teori terkait dengan penelitian ini. Tujuan dari pemaparan konsep teori adalah memudahkan penyampaian informasi dari penulis secara menyeluruh dan menjadi acuan dari berlangsungnya penelitian ini. Adapun konsep teori yang perlu dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Mardikanto (2013:161) menjelaskan pendekatan pemberdayaan masyarakat dapat pula diformulasikan dengan mengacu kepada landasan filosofi dan prinsip-prinsip pemberdayaan, yaitu:

1. Pendekatan partisipatif, dalam arti selalu menempatkan masyarakat sebagai titik pusat pelaksanaan pemberdayaan. Pemberdayaan selalu bertujuan untuk memecahkan masalah masyarakat, bukan untuk mencapai tujuan-tujuan orang luar atau penguasa, metode atau teknik pemberdayaan maupun teknologi yang ditawarkan harus berbasis pilihan masyarakat sampai pada ukuran keberhasilan berdasarkan ukuran-ukuran masyarakat sebagai penerima manfaatnya.

2. Pendekatan kesejahteraan, dalam arti bahwa kegiatan yang akan dilakukan, sumberdaya, teknologi serta pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan, pemberdayaan masyarakat harus memberikan manfaat terhadap perbaikan terbaik atau kesejahteraan masyarakat penerima manfaatnya.

3. Pendekatan pembangunan berkelanjutan, dalam arti bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat harus terjamin keberlanjutannya. Oleh sebab itu, pemberdayaan masyarakat tidak boleh menciptakan ketergantungan, tetapi harus mampu menyiapkan masyarakat penerima manfaatnya agar pada suatu saat mereka akan mampu mandiri untuk melanjutkan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagai proses pembangunan yang berkelanjutan.

Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri (**Kartasasmita dalam Mardikanto, 2013:163**), Berdasarkan konsep demikian, maka pemberdayaan masyarakat harus mengikuti pendekatan sebagai berikut :

1. Upaya itu harus terarah. Ini yang secara populer disebut pemihakan, yang ditunjukkan langsung pada yang memerlukan, dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya sesuai kebutuhannya.

2. Pemberdayaan harus langsung mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan yang menjadi penerima manfaatnya. Mengikutsertakan masyarakat yang menjadi penerima manfaat mempunyai beberapa tujuan, yakni supaya bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan kemampuan serta kebutuhan mereka.

3. Menggunakan pendekatan kelompok, karena secara sendiri-sendiri masyarakat miskin sulit untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya lingkup bantuan menjadi terlalu luas apabila penanganannya dilakukan secara individu.

2. Pembangunan

Menurut **Todoro (2011:46)** pembangunan harus dilihat dari sebagai suatu

Proses yang multidimensional yang mencakup perubahan-perubahan mendasar didalam struktur sosial, perilaku masyarakat, perbaikan institusi-institusi yang seiring dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi, penurunan ketidak merataan distribusi pendapatan dan pemberantasan kemiskinan.

Konsep Operasional

Untuk mempermudah dalam menganalisa penelitian dan menghindari salah pengertian dan pemahaman terhadap penelitian ini maka penulis perlu memaparkan definisi konsep yang akan digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini. Untuk melakukan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) di kota pekanbaru. Sebagai berikut :

1. Pemberdayaan adalah upaya yang dillakukan untuk meningkatkan harkat dan martabat serta mensejahterakan warga dalam pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) di Kota Pekanbaru.
2. Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) di Kota Pekanbaru ini yang mana Program ini dilaksanakan secara meanisme pelaksanaan kegiatan PMB-RW di Kota Pekanbaru pada tahun 2016 dengan menggunakan anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat pelaksanaan pelaksana tekni kegiatan, pejabat pengadaan barang/jasa, panitia/pejabat hasil pekerjaan, bendahara pengeluaran, serta LKM-RW selaku kelompok masyarakat.
3. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) kota Pekanbaru adalah program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah kota

Pekanbaru melalui proses pendekatan pola pemberdayaan masyarakat.

Jenis Penelitian

Adapun dapat penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan berperilaku yang dapat diamati yang diarahkan pada latar dan individu secara holistik (utuh).berdasarkan hal tersebut penelitian dilakukan dengan metode kualitatif agar diperoleh data secara alamiah atau natural dan komprehensif yang sesuai dengan latar dan data yang diperoleh tidak merupakan hasil rekayasa atau manipulasi karena tidak ada unsur atau variabel lain yang mengontrol.

Lokasi Penelitian

Lokasi merupakan bagian penting dalam sebuah penelitian, sehingga sebuah penelitian akan mendapatkan hasil. Dalam penelitian ini akan dilakukan di Kantor Wali Kota Pekanbaru, Serta kelurahan yang telah melaksanakan program PMB-RW atau pun yang belum melaksanakan Program PMB-RW di Kota Pekanbaru.

Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan informan sebagai objek informasi mengenai Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) di Kota Pekanbaru. Informan adalah seseorang yang dalam penelitian menjadi narasumber untuk memberikan data atau orang yang akan memberikan keterangan, orang-orang yang benar-benar mengetahui segala macam informasi yang dibutuhkan oleh penulis.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *snowball sampling*. Metode *snowball sampling* adalah metode penentuan sampel yang pertama-tama dipilih satu atau dua orang, tetapi karena dua orang ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tau dan dapat melengkapi data. Informan pada penelitian ini adalah:

1. DPRD Kota Pekanbaru
2. Lurah Sidomulyo Barat

3. Pendamping PMB-RW di Kelurahan Sidomulyo Barat
4. Rukun Warga (RW)
5. Masyarakat

Jenis dan Sumber Data

Untuk mengorganisir data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka penulis membagi data kedalam dua point yaitu:

a. Data Primer

Data Primer Adalah data yang diperoleh dari responden yang menjadi obyek penelitian berupa informasi yang relevan dengan masalah-masalah yang sudah dirumuskan dalam penelitian. Berdasarkan acuan dari Standar Operasional Pelayanan (SOP) PMB-RW dan perda yang mengaturnya.

b. Data Sekunder

Data Sekuder Adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan laporan yang ada kaitannya dengan masalah penelitian dan juga buku-buku yang berkenaan dengan penelitian ini, antara lain:

1. Ketua DPRD Kota Pekanbaru
2. Lurah Sidomulyo Barat
3. Pendamping PMB-RW di Kelurahan Sidomulyo Barat
4. Rukun Warga (RW)
5. Masyarakat
6. Sejarah Ringkas PMB-RW Sejarah kota Pekanbaru berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat.

Teknik Pengumpulan Data

Beberapa teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data, baik berupa data primer maupun data sekunder sesuai dengan penelitian kualitatif adalah sebagai berikut :

a. Observasi (pengamatan)

Merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap objek yang akan diteliti. Guna untuk mengetahui sejauh mana Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) di Kota Pekanbaru. Observasi langsung Data yang

didapat melalui observasi langsung terdiri dari pengamatan secara rinci tentang kegiatan, perilaku, tindakan orang-orang, serta juga keseluruhan kemungkinan interaksi interpersonal dan segala hal yang dapat diamati.

b. Wawancara Interview

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab langsung terhadap responden yang berhubungan dengan penelitian melalui daftar pertanyaan yang sesuai dengan permasalahan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan penting yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya – karya monumental dari seseorang.

Analisis Data

Analisis data dilakukan untuk menganalisis data-data yang didapat dari penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu data yang berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun sehingga dalam analisis data kualitatif tidak menggunakan perhitungan matematis atau teknik statistik sebagai alat bantu analisis, data kualitatif akan digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Jadi, dalam penelitian ini analisis data dilakukan dengan cara mendeskripsikan mengenai bagaimana Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) di Kota Pekanbaru, berdasarkan fakta dan data kualitatif yang bersumber dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, yang di trianggulasikan, untuk kemudian bisa menarik suatu kesimpulan hasil penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Petunjuk Teknis (Juknis) tentang pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) dalam Pelaksanaan Perwako yang dikeluarkan pada Perwako No 44 Tahun 2014 Tentang PMB-RW Kota Pekanbaru, bertabrakan dengan aturan Peraturan

Presiden (Perpers) No 70 Tahun 2012 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Kemandirian

Aspek pertama dalam teori Pelaksanaan Program Pemberdayaan Sumaryadi yaitu Kemandirian. Kemandirian merupakan kemampuan warga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga tidak bergantung pada orang lain. Sikap melakukan sesuatu atas dorongan sendiri untuk mulai menjalankan sosial dan adanya upaya dalam menyelesaikan masalahnya sendiri.

Pada aspek pertama dalam teori tersebut memiliki sub-indikator yang terbagi menjadi 3 yaitu :

a. Ekonomi

Pada Pelaksanaan Program PMB-RW di kecamatan Tampan Kelurahan Sidomulyo Barat dalam pengamatan penulis yaitu belum berdampak signifikan terhadap perekonomian masyarakat yang mengikutinya. Hal tersebut dikarenakan kegiatan yang dilaksanakan pada Pelaksanaan program PMB-RW di Kecamatan Tampan Kelurahan Sidomulyo Barat belum tercapai dengan baik. Kegiatan Pelaksanaan Program PMB-RW di Kecamatan Tampan Kelurahan Sidomulyo Barat hanya berlangsung sebentar saja. Kegiatan tersebut hanya berupa kepelatihan.

Dari hasil wawancara tersebut penulis dapat menganalisis bahwa Pelaksanaan Program PMB-RW di Kecamatan Tampan Kelurahan Sidomulyo Barat ini belum meningkatkan atau merubah sosial kehidupan masyarakat yang mengikuti kegiatan PMB-RW. Pelaksanaan Program ini hanya berlangsung beberapa hari saja, dan tidak menjadikan sebagai kegiatan yang

merubah status atau kelas sosial masyarakat yang mengikutinya.

b. Intelektual

Dalam sub-indikator ini membahas apakah Pelaksanaan Program PMB-RW di Kelurahan Sidomulyo Barat memiliki dampak terhadap intelektual masyarakat yang mengikutinya. Pada Pelaksanaan Program PMB-RW di Kelurahan Sidomulyo Barat memiliki beberapa kegiatan pelatihan yang merupakan untuk meningkatkan keahlian dan kemampuan. Kepelatihan itu berupa jahit-menjahit, bengkel dan lain sebagainya. Kegiatan pada Pelaksanaan Program PMB-RW menurut penulis suatu kegiatan yang meningkatkan intelektual masyarakat yang mengikutinya. Selain menurut pendapat penulis, penulis dapat mewawancarai Pendamping yang mengetahui bagaimana kegiatan tersebut.

1. Koordinasi

Koordinasi tersebut yaitu suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan Pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Pada Pelaksanaan Program PMB-RW di Kelurahan Sidomulyo Barat koordinasi sudah dilaksanakan dengan matang. Sudah menginformasikan kepada masyarakat,

Dari hasil wawancara tersebut penulis dapat menganalisis bahwa koordinasi sudah berjalan dengan baik, dari rapat yang dilaksanakan tingkat Kota Pekanbaru, lalu tingkat Camat, terus turun ke Kelurahan dan LKM-RW. Tapi tetap saja Pelaksanaan Kegiatan membutuhkan dana. Dana tersebut direalisasikan pada akhir tahun, dan anggarannya juga terbatas.

2. Komunikasi

Suatu proses dalam nama seseorang atau beberapa orangKelompok organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak.

Komunikasi pada Pelaksanaan Program PMB-RW di Kelurahan Sidomulyo Barat dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis. Harus melakukan sosialisasi agar masyarakat berpartisipasi dalam Pelaksanaan Program PMB-RW di Kelurahan Sidomulyo Barat. Dalam pelaksanaannya juga adanya komunikasi untuk mendapatkan kegiatan prioritas yang dilaksanakan oleh tenaga penadamping.

3. Keadilan

Kesamaan hak sebagai warga Negara untuk mendapatkan dan menjalankan kehidupan yang layak serta mampu memenuhi kebutuhan dasarnya seperti masyarakat pada umumnya. Pelaksanaan Program PMB-RW di Kelurahan Sidomulyo Barat yaitu Pelaksanaan Program yang merujuk pada pemberdayaan masyarakat yang memiliki cakupan yang lebih kecil, sehingga masyarakat dari RW bisa mengikuti kegiatan dalam Pelaksanaan Program PMB-RW di Kelurahan Sidomulyo Barat. Pada faktor keadilan ini, memiliki beberapa sub-indikator yaitu :

a. Keadilan legal

Keadilan legal yaitu keadilan menurut undang-undang dimana objeknya masyarakat yang dilindungi UU untuk kebaikan bersama.

b. Keadilan Kumutatif

Keadilan Kumutatif yaitu suatu bentuk dari perlakuan terhadap

Seseorang dengan tanpa melihat jasa-jasa yang telah diberikan atau diperbuatnya. Keadilan ini berlangsung pada Pelaksanaan Program PMB-RW yaitu dari honor/gaji tenaga pendamping. Gaji tenaga pendamping tidak melihat jasa-jasa yang diberikan.

4. Keberlanjutan

Merupakan suatu kegiatan terus-menerus yang memungkinkan Terpenuhi kebutuhan dasar lainnya. Pada Pelaksanaan Program PMB-RW di Kelurahan Sidomulyo Barat sebenarnya sangat bagus bila terlaksana dengan baik. Dari perencanaan, pelaksanaan, dan sampai pengevaluasian.

Pelaksanaan program PMB-RW di Kelurahan Sidomulyo Barat baik untuk di pertahankan dan dilanjutkan dan memiliki tujuan memberdayakan masyarakat dan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan pengetahuan. **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Pada Masyarakat Di Kelurahan Sidomulyo Barat**

Dalam penelitian yang penulis lakukan pada Pelaksanaan Program PMB-RW di Kelurahan Sidomulyo Barat, penulis dapat bahwasanya Pelaksanaan Program PMB-RW di Kelurahan Sidomulyo Barat ini belum dikatakan berhasil. Belum berhasilnya Pelaksanaan Program PMB-RW dikarenakan ada beberapa aspek yang belum terlaksana dengan baik dari pelaksanaan program PMB-RW di Kelurahan Sidomulyo Barat ini. Selain itu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) yang penulis dapatkan dari Pelaksanaan Program PMB-RW di Kelurahan

Sidomulyo Barat. Faktor tersebut adalah :

1. Dana

Sangat minimnya dana yang di realisasikan Pemerintah Kota sehingga Pelaksanaan Program berjalan tidak merata. Dalam Pelaksanaan Program PMB-RW memerlukan dana untuk Pelaksanaan kegiatan agar kegiatan berjalan dengan baik.

2. Tenaga

Tenaga pendamping sangat mempengaruhi keberhasilan Pelaksanaan Program PMB-RW di Kelurahan Sidomulyo Barat. Tenaga Pendamping yang dipilih dari kalangan sarjana akan membuat Pelaksanaan Program yang dilakukan menjadi program yang berkualitas yang akan meningkatkan sub-indikator pada indikator pertama yaitu ekonomi, sosial, dan intelektual. sesuaikan dengan sarjana keahlian mereka masing-masing.

1. Pikiran/Ide

Ide atau gagasan adalah rancangan yang tersusun dipikiran. Pada faktor Ini yang membawa dampak berpengaruh terhadap bagaimana partisipasi dalam bentuk ide atau pikiran dari masyarakat, tenaga pendamping ataupun tokoh masyarakat dan lain-lainnya.

Partisipasi berbentuk ide dalam Pelaksanaan Program PMB-RW ini untuk menentukan perencanaan dari Pelaksanaan Program PMB-RW yang nantinya akan dijadikan kegiatan yang prioritas dan memiliki tujuan yang baik dalam pelaksanaan maupun hasil.

3. Keadilan

Pada faktor ini sangatlah penting. Karena sebaiknya dalam Pelaksanaan Program PMB-RW di Kelurahan Sidomulyo Barat berjalan sesuai yang membutuhkan.

Seharusnya dana yang minim tersebut bisa dikendalikan dan

direalisasikan dengan baik oleh Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan(PPTK). Dilihat dari kegunaannya, dan yang membutuhkannya.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian penulis pada Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis rukun Warga (PMB-RW) diKecamatan Tampan Kelurahan Sidomulyo Barat Kota Pekanbaru pada dasarnya adalah suatu kebijakan yang dibuat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui Pemberdayaan yaitu Kepelatihan. Adanya Pelaksanaan PMB-RW tersebut untuk mendasari bahwasanya Rukun Warga merupakan suatu pembagian wilayah Indonesia dibawah kelurahan, Rukun Warga adalah lembaga yang paling dekat dengan masyarakat. Kedekatan tersebut untuk mencakup atau mengetahui warganya yang membutuhkan ataupun dengan Pelaksanaan PMB-RW bisa meningkatkan taraf kehidupan. Dari penelitian yang telah penulis lakukan dapat ditarik kesimpulan yaitu :

1. Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga(PMB-RW) di Kelurahan Sidomulyo Barat belum bisa meningkatkan ekonomi, sosial masyarakat, akan tetapi pengetahuan masyarakat yang mengikuti pelatihan sudah didapatkan dalam Pelaksanaan Program PMB-RW. Akan tampilan/kemampuan tersebut tidak bisa dijadikan pekerjaan karena tidak adanya modal untuk peralatan dan lain sebagainya dalam membuat lapangan pekerjaan. Partisipasi dari tenaga pendamping sudah berjalan dan memiliki manfaat bagi berjalannya Pelaksanaan Program PMB-RW dalam perencanaan dan pengawasan.
2. Adapun Faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan program Pemberdayaan

Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) di Kelurahan Sidomulyo Barat yaitu Partisipasi berbentuk dana dan tenaga/ide berupa gagasan serta keadilan. Dana untuk pelaksanaan kegiatan yang akan mempengaruhi Pelaksanaan sehingga partisipasi tenaga pendamping dan ide gagasan berjalan sesuai keinginan masyarakat. Sehingga berlangsungnya keadilan dalam Pelaksanaan Program PMB-RW.

Saran

Dari kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, penulis memberikan saran atau Masukan-masukan sebagai berikut :

1. Agar tercapai keberhasilan dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) pada peningkatan ekonomi dan status sosial sebaiknya Pelaksanaan berupa pelatihan lebih dimaksimalkan dalam pertemuan pembelajaran. Pertemuan lebih di perbanyak. Diberikan modal untuk membuka lapangan pekerjaan sendiri melalui keterampilan dan intelektual yang didapat sewaktu pelatihan. Melalui anggaran dari pemerintah daerah Kota Pekanbaru untuk menyiapkan dana agar diberikan modal berupa barang menurut kemampuan/keterampilan peserta.
2. Melihat dari pelaksanaan PMB-RW ini pada kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan pada pelatihan PMB-RW ini tidak merata masyarakat mendapatkan program ini,sebaiknya untuk pelaksanaan PMB-RW ini harus sama rata

semua RW mendapatkan program pelatihan PMB-RW ini, agar ketika pelaksanaan program PMB-RW lebih efektif dan dapat mencapai tujuan yang telah dibuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwas, Oos M. 2004. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung: Alfabeta.
- Amalia, Imanda, 2009. *Partisipasi Masyarakat dalam Program Kelurahan Siaga Di Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya*, Skripsi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya.
- Ambar Teguh Sulistyani, 2004, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan* Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Aprilia, Theresia, dkk, 2014. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, Alfabeta. Bandung.
- Halim, AS, Khambali, I, Basyid. 2005. *Model-Model Pemberdayaan Masyarakat*, Pustaka Pesantren. Yogyakarta.
- M.M, Zulkarnain 2010. *Kewirausahaan, Strategi Pemberdayaan Usaha Kecil dan Penduduk Miskin*. Yogyakarta. Adicita Karyanusa
- Mardikanto, Totok, Soebiato Poerwoko. (2015). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik Edisi Revisi*. Bandung: Alfabeta.
- Mudiyono, dkk. 2005. *Dimensi-Dimensi Masalah Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat*, APMD Press. Yogyakarta
- Setiana, Lucie. 2005. *Teknik Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Ghalia Indonesia. Jakarta
- Soebroto, Prof. Soetandyo Wignyo. MPA, 2005. *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta. PT LKS Pelangi Aksara
- Suharto, Edi, 2009, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Sulistiyani, Ambar, Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model - model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Agus Sujono, 2008. *Paradigma, Model Pendekatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otonomi Daerah*. LPD-PA UNIBRAW.
- Arief Budiman, 2000. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Chamhuri Siwar, 2001. *Pembangunan Mapan, Strategi "menang-menang" untuk Pembasmian Kemiskinan dan Pendidikan Alam Sekitar*. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.
- Usman Sunyoto, 2004. *Pembangunan dan Penguatan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peraturan dan Perundang-undangan serta Narasumber Lainnya**
- Peraturan Daerah (Perda) pekanbaru No. 5 tahun 2016 tentang PMB RW Kota Pekanbaru.
- Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru No.19 tahun 2012 tentang RPJM Pekanbaru.
- Undang-undang (UU) No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Presiden (Perpres) No 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- Instruksi Presiden (Inpres) No.3 tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan.